

**PENGELOLAAN DAS BODRI  
DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE SYSTEM ANALYSIS**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh:

**HUSNA FAUZIA  
NIM. 21040117410036**



**FAKULTAS TEKNIK  
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

# PENGELOLAAN DAS BODRI DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE SYSTEM ANALYSIS

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh:

**Husna Fauzia**  
**NIM. 21040117410036**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 26 Juni 2019

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

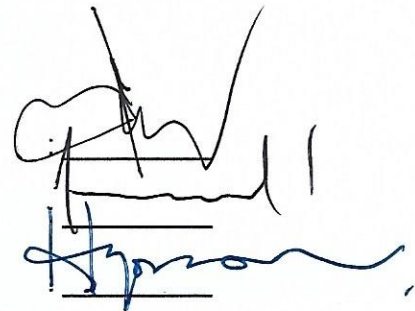
Semarang, 26 Juni 2019

Tim Penguji

Rukuh Setiadi, ST, MEM, PhD – Pembimbing

Dr. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP – Penguji 1

Dr. Ir. Hadi Wahyono, MA – Penguji 2



Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro



  
**Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc.**

## ABSTRAK

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) memerlukan kerjasama dan integrasi program dari semua stakeholder, baik instansi pemerintah, lembaga non pemerintah/swasta, maupun masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Namun demikian, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan DAS, tidak terkecuali pada DAS Bodri. DAS yang melalui tiga (3) wilayah Kabupaten ini (Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal) memiliki peran dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi pengelolaan DAS Bodri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan Governance System Analisis (GSA). Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi baik dalam penerapan pengetahuan, konektivitas dan kapasitas partisipasi tata kelola dari stakeholder yang terkait dengan pengelolaan DAS Bodri. Hal ini menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan dan ekosistem di wilayah DAS Bodri. Permasalahan yang timbul antara lain alih fungsi lahan yang masif, erosi, longsor, banjir dan kekeringan di DAS Bodri, serta konflik antar stakeholder dalam pengelolaan DAS.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pengelolaan DAS Bodri antara lain (1) melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar stakeholder terkait pengelolaan DAS Bodri baik pada tahap perencanaan implementasi maupun monitoring. (2) meningkatkan kapasitas SDM baik secara kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh stakeholder terkait pengelolaan DAS Bodri. (3) melakukan internalisasi RPDAS Terpadu Bodri dan Pola dan Rencana Wilayah Sungai Bodri Kuto dengan RPJMD masing-masing stakeholder terkait. (4) Perlu penguatan leading sector (Bappeda) dan dukungan dari pemerintah setempat baik dalam hal kebijakan, dukungan teknis dan dukungan keuangan dalam mengimplemantasikan apa yang sudah menjadi rumusan dari forum pengelolaan DAS. (5) Perlu peningkatan dan pemerataan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan DAS Bodri oleh stakeholder terkait. (6) melakukan penyalarsan undang-undang terkait pengelolaan DAS Bodri dengan menggunakan Tugas Pembantuan yakni penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Sub Urusan Pengelolaan DAS.

**Kata kunci: pengelolaan DAS, governance system analysis, DAS Bodri.**

## **ABSTRACT**

*Management of watersheds (DAS) requires cooperation and integration of programs from all stakeholders, both government agencies, non-governmental / private institutions, and communities. This has been regulated in Government Regulation Number 37 of 2012 concerning Watershed Management and Indonesian Minister of Forestry Regulation Number P.39 / Menhut-II / 2009 concerning Guidelines for Preparation of Integrated Watershed Management Plans. However, in reality, there are still various problems in watershed management, including the Bodri watershed. The Bodri watershed which passing through the three (3) regencies (Temanggung Regency, Semarang Regency and Kendal Regency) has a role in the socio-economic life of the surrounding communities.*

*This research was conducted to analyze and evaluate the conditions of Bodri watershed management. The method used in this research is descriptive qualitative approach to Governance System Analysis (GSA). The results obtained in this study are still lack of coordination, integration, synergy and synchronization both in the application of knowledge, connectivity and capacity for participation in governance from stakeholders related to the management of the Bodri watershed. This has caused problems of environmental and ecosystem damage in the Bodri watershed area. Problems that arise include massive land conversion, erosion, landslides, floods and droughts in the Bodri watershed, as well as conflicts between stakeholders in watershed management.*

*Recommendations that can be given for improving Bodri watershed management include (1) coordinating, integrating, synchronizing and synergizing among stakeholders regarding the management of the Bodri watershed both in the implementation planning and monitoring stages. (2) increasing human resource capacity both in quality and quantity of human resources owned by stakeholders related to Bodri watershed management. (3) internalizing Bodri Integrated RPDAS and Bodri Kuto River Basin Patterns and Plans with RPJMD of each relevant stakeholder. (4) It is necessary to strengthen the leading sector (Bappeda) and support from the local government both in terms of policies, technical support and financial support in implementing what has become the formulation of the watershed management forum. (5) Need to increase and equalize the use of technology in the Bodri watershed management system by relevant stakeholders. (6) harmonizing laws related to the management of the Bodri watershed by using the Assistance Task, namely assignment from the Provincial Government to the Regency / City Region to carry out part of the Watershed Management Sub-Section.*

**Keywords:** *watershed management, governance system analysis (GSA), Bodri watershed.*